



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

Nomor : 1345/DJMT/PW1.4/XI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Hal : Penugasan Hakim sebagai Responden
dalam Survei Integritas Hakim Tahun 2025

Jakarta, 11 November 2025

Kepada Yth.

1. Para Ketua, Para Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
2. Para Kepala, Para Wakil Kepala, Para Hakim pada Pengadilan Militer;
3. Para Ketua, Para Wakil Ketua, Para Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

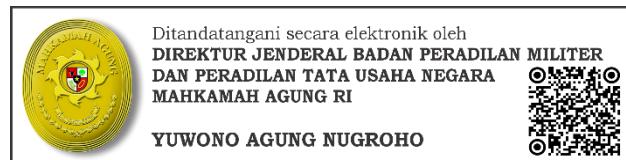
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 344/SET/LI.04.03/10/2025 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Pelaksanaan Survei Integritas Hakim Tahun 2025 pada Hakim Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, bersama ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menugaskan Saudara untuk menjadi responden dalam Survei/Wawancara Integritas Hakim Tahun 2025 dimaksud.

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh PT. Comlec Indonesia sebagai pelaksana survei dalam rangka membangun Indeks Integritas Hakim Tahun 2025. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdri. Ami (0815-1012-5205) dan Sdri. Eni (0858-1754-8027).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

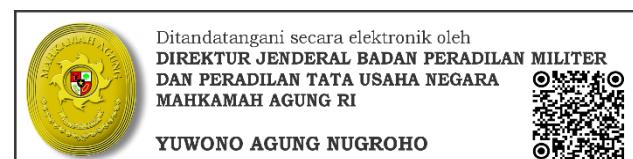
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Yth. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM SURVEI INTEGRITAS HAKIM
TAHUN 2025

PROVINSI	PERADILAN MILITER	PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Aceh	Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Sumatera Utara	Pengadilan Militer I-02 Medan	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
		Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Sumatera Barat	Pengadilan Militer I-03 Padang	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Riau	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Jambi	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Sumatera Selatan	Pengadilan Militer I-04 Palembang	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
		Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Bengkulu	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Lampung	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Bangka Belitung	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Kepulauan Riau	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
DKI Jakarta	Pengadilan Militer II-08 Jakarta	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Jawa Barat	Pengadilan Militer II-09 Bandung	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Jawa Tengah	Pengadilan Militer II-10 Semarang	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
DI Yogyakarta	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Jawa Timur	Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
		Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Banten	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Bali	Pengadilan Militer III-14 Denpasar	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nusa Tenggara Barat	-	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
		Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nusa Tenggara Timur	Pengadilan Militer III-15 Kupang	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Kalimantan Barat	Pengadilan Militer I-05 Pontianak	Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Kalimantan Tengah	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Kalimantan Selatan	Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin
		Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Kalimantan Timur	Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Sulawesi Utara	Pengadilan Militer III-17 Manado	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
		Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Sulawesi Tengah	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Sulawesi Selatan	Pengadilan Militer III-16 Makassar	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
		Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Sulawesi Tenggara	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Gorontalo	-	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
Maluku	Pengadilan Militer III-18 Ambon	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Papua	Pengadilan Militer III-19 Jayapura	Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura





KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor	:	344/SET/LI.04.03/10/2025	Jakarta, 31 Oktober 2025
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	1 Berkas	
Hal	:	Pelaksanaan Survei Integritas Hakim Tahun 2025 pada Hakim Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	

**Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung Republik Indonesia**
Jl. Jenderal A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Yudisial RI sebagaimana dalam Nomor 2826/PIM/LI.04.03/10/2025 tanggal 3 Oktober 2025 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Program Kegiatan Pengukuran Indeks Integritas Tahun 2025 yang mendukung Asta Cita ke-7 pemerintahan Presiden republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan Korupsi dan Narkoba" dengan Program Prioritas Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, Komisi Yudisial RI senantiasa mengorkestrasikan tugas dan kewenangan dengan menetapkan visi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 yaitu "Menjadi Lembaga Yang Kredibel untuk Hakim yang Mandiri dan Berintegritas dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dengan indikator indeks integritas hakim.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan bantuan dan izin terhadap pelaksanaan pemetaan wilayah, wawancara, dan pengambilan data pada Hakim Tingkat pertama, Hakim Tingkat Banding, pada Peradilan Militer dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terlampir, dan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Kegiatan...

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh PT. Comlec Indonesia sebagai pelaksana survei dalam rangka membangun Indeks Integritas Hakim Tahun 2025. Adapun narahubung kegiatan ini adalah Sdri. Ami dengan nomor HP 0815-1012-5205 dan Sdri. Eni 0858-1754-8027.

Demikian hal tersebut kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Arie Sudihar

Tembusan

1. Yth. Ketua Komisi Yudisial RI;
2. Yth. Wakil Ketua Komisi Yudisial RI;
3. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
4. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
bidang Non Yudisial;
5. Yth. Para Ketua Pengadilan Militer Tinggi;
6. Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
7. Yth. Para Ketua Pengadilan Militer;
8. Yth. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
9. Yth. PT. Comlec Indonesia.